

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Ridwan (2015). Analisis Kewajaran Belanja dengan Pendekatan Model Analisis Standar Belanja pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Tesis Magister. Padang, Universitas Andalas.
- Bastian, Indra (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- BPKP Nomor: KEP-607?K/SU/2005 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2005
- Carter, K. W (2006). *Cost Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dobell, Peter & Martin Ulrich (2002). *Parliament's Performance in The Budget Process: A Case Study Policy Matters* 3 (2): 1-24.
- Garrison, H. Ray; Eric W dan Peter C. Brewer (2006). Akuntansi Manajerial. Jakarta : Salemba Empat.
- Gunawan, M. Ali (2009). Analisis Regresi dibarengi dengan Aplikasi SPSS for Windows.
- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen-YPKN.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Laporan Akhir (2017). Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Madiun.
- Mahmudi (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mairizal (2016). Analisis Kewajaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan Pendekatan Model Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kota Pariaman. Tesis Magister. Padang, Universitas Andalas.
- Mardismo (2001). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- \_\_\_\_\_ (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Noviawati, Nana (2017). Analisis Kesesuaian Objek Belanja dan Penyusunan Model Analisis Standar Belanja (ASB) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tesis Magister. Padang, Universitas Andalas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putri, Rahayu Kurnia (2017). Analisis Kesesuaian Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya dalam Pnganggaran Kegiatan serta Penyusunan Analisis Standar Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tesis Magister. Padang, Universitas Andalas.

Prameswari, Mesa (2006). Evaluasi Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Tesis Magister. Padang, Universitas Andalas.

Ritonga, Irwan Taufiq (2010). Analisis Standar Belanja: Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah. Yogyakarta:

Sekolah Pascasarjana UGM.

Sekaran, Uma (2006). *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Suhairi (2017). Bahan Seminar Analisis Standar Belanja: Konsep dan Teknik Perhitungan. Bukittinggi

Sugiyono (2004). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.

\_\_\_\_\_(2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.

Tanjung, A. Hafiz (2010). Perannan dan Teknik Penyusunan ASB dalam Penyusunan APBD. (Kabupaten Pelalawan Riau: 23-24 Maret 2010).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Walpole, Ronald E (1997). Pengantar Statistika, Edisi ke-3. Jakarta: PTM Gramedia Pustaka Umum.

